



Buku Seri
Sejarah Islam
Indonesia
Modern

Gerakan - Gerakan **ISLAM** Indonesia Kontemporer

Editor: Muhammad Wildan



Editor: Muhammad Wildan



Gerakan - Gerakan ISLam Indonesia Kontemporer

**~Zuhroh Lathifah~Syamsul Arifin~ Mundzirin Yusuf ~Riswinarno~ Badrun~
~Dudung Abdurrahman~ Siti Maimunah ~Nurul Hak~ Musa~Machasin~
~Sujadi~Soraya Adnani~Muhammad Wildan~ Maharsi~Fatiyah~**



Perpustakaan Nasional RI Data Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

Copyright @ 2020 Penulis
@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang
Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau
seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit, adalah tindakan tidak bermoral
dan melawan hukum.

Buku Seri Sejarah Islam Indonesia Modern
GERAKAN-GERAKAN ISLAM INDONESIA KONTEMPORER

ISBN: 978-979-8548-12-3

Penulis : Zuhroh Lathifah, Syamsul Arifin, Mundzirin Yusuf,
Riswinarno, Badrun, Dudung Abdurrahman,
Siti Maimunah, Nurul Hak, Musa, Machasin, Sujadi,
Soraya Adnani, Muhammad Wildan, Maharsi, Fatiyah

Editor : Muhammad Wildan

Setting Layout : Tim Adab Press

Desain Cover : Tim Adab Press

Cetakan ke 1 : November 2020

Diterbitkan oleh



Adab Pres
Fakultas Adab dan Ilmu Budaya
Jl. Laksda Adisutjipto Yogyakarta Indonesia
Email: Adab_press@yahoo.co.id



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	v
Daftar Isi	vii
SAREKAT ISLAM PELOPOR GERAKAN KEBANGSAAN	1
A. Pendahuluan	1
B. Latar Belakang Lahirnya SDI	2
C. Ideologi dan Pemikiran	7
D. SI Menjadi Partai Politik.....	14
E. Perpecahan di Tubuh SI	16
F. SI pada Masa Reformasi	16
G Penutup.....	20
KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH BAGI BANGSA INDONESIA	24
A. Pendahuluan	24
B. Latar Belakang didirikannya Muhammadiyah	25
C. Ideologi Muhammadiyah	29
D. Implementasi dan Respons Masyarakat	30
E. Kontribusi Muhammadiyah	33
F. Perkembangannya dan Respons Masyarakat.....	47
G. Muhammadiyah Dewasa Ini dan Kendalanya	45
H. Penutup.....	47
ISLAM, PEREMPUAN, DAN KEMANUSIAAN:	
‘Aisyiyah Sebagai Gerakan Sosial Baru di Awal Abad 21 ..	51
A. Pendahuluan	52



B. Kelahiran dan Perkembangan ‘Aisyiyah	53
C. Hati dan Jantung Pemikiran ‘Aisyiyah (Ideologi).....	55
D. Reformasi dan Langkah Baru Aisyiyah	69
REVITALISASI TRILOGI UKHUWAH NU DI ERA REFORMASI:	
Islamiyah, Wathaniyyah Dan Insaniyyah	77
A. Pendahuluan	78
B. NU dan Sejarah Pemikiran Trilogi Ukhwah.....	81
C. Trilogi Ukhwah: Pengejawantahan Ideologi NU	86
D. Respons Terhadap Persoalan Kontemporer.....	89
E. Penutup	96
DINAMIKA KONTEMPORER PERSATUAN ISLAM	
(PERSIS), 1945-2015	99
A. Pendahuluan	99
B. Pemikiran Keagamaan	100
C. Orientasi Sosial-politik	103
D. Pengembangan Pendidikan dan Dakwah	109
E. Kesimpulan	115
KIPRAH & PERGULATAN MUI DALAM PEMBANGUNAN	
INDONESIA (1975-2020).....	119
A. Pendahuluan	119
B. Sejarah Berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI)	120
C. Kiprah MUI di Indonesia	130
D. MUI dalam Sorotan	135
E. Penutup	140
AKAR IDEOLOGI DAN GERAKAN SOSIAL KEAGAMAAN	
MAJELIS TAFSIR AL-QUR’AN (MTA).....	144
A. Pendahuluan	144
B. Latar Belakang Berdirinya MTA	147



C. Struktur Organisasi, Kepengurusan dan Keanggotaan .	150
D. Profil Abdullah Thufail dan Genealogi Ideologi MTA..	152
E. Gerakan Sosial Keagamaan MTA	156
F. Kesimpulan.....	161
 HIZBUT TAHIRR INDONESIA: Bergerilya Di Antara Islam dan Islamisme.....	165
A. Pendahuluan	165
B. Latar Belakang Sejarah.....	166
C. Ideologi Keagamaan.....	172
D. Kiprah dan Dinamika Gerakan	176
E. Penutup	180
 AHMADIYAH DI INDONESIA.....	185
A. Pendahuluan	185
B. Tentang Berdirinya Ahmadiyah.....	186
C. Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI).....	190
D. Ajaran Pokok Ahmadiyah	194
 DEWAN DAKWAH ISLAMIYAH INDONESIA: Berdakwah & Berpolitik Di Era Orde Baru Dan Reformasi	198
A. Pendahuluan 154	
B. Mengawal DDII.....	200
C. Aktivitas DDII pada Era Orba dan Reformasi	206
D. Epilog	217
 DINAMIKA IKATAN CENDEKIAWAN MUSLIM INDONESIA DALAM SEJARAH PERPOLITIKAN DI INDONESIA.....	225
A. Pendahuluan	225
B. Sejarah Berdirinya ICMI.....	227
C. Ideologi ICMI: Islam Kultural	230



D. Dinamika Organisasi (Internal)	236	
E. Gerakan Sosial Keagamaan	244	
F. Penutup	246	
PERJUANGAN KONSTITUSIONAL PARTAI KEADILAN SEJAHTERA DAN TANTANGAN ISLAMISME.....		248
A. Pendahuluan	248	
B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera	249	
C. Dari Gerakan Dakwah ke Partai Politik	252	
D. PKS: Partai dan Gerakan Dakwah	256	
E. Ideologi PKS	257	
F. PKS, Demokrasi, dan Kebangsaan	261	
G. Antara Islamisme dan Post-Islamisme	262	
H. Dinamika dan Arah Gerakan PKS.....	264	
I. Penutup	267	
KARAKTERISTIK JAMAAH TABLIGH DI INDONESIA		270
A. Pendahuluan	270	
B. Sejarah Jamaah Tabligh	272	
C. Sistem Dakwah	278	
D. Kehidupan Sosial Kemasyarakatan	281	
E. Kehidupan Budaya.....	284	
F. Penutup	288	
MAJELIS MUJAHIDIN INDONESIA (MMI): SEJARAH, PEMIKIRAN, DAN GERAKAN		291
A. Pendahuluan	291	
B. Sejarah Berdiri.....	292	
C. Pemikiran	296	
D. Gerakan	300	
E. Penutup	303	



PERJUANGAN KEBANGSAAN & PENDIDIKAN AL-IRSYAD	307
A. Pendahuluan	307
B. Al-Irsyad Berdiri dan Berkembang	309
C. Al-Irsyad, dari Pendidikan ke Politik	317
D. Al-Irsyad Kembali Sebagai Gerakan Pendidikan.....	323
E. Penutup	325
 BIODATA PENULIS.....	328

PERJUANGAN KONSTITUSIONAL PARTAI KADEILAN SEJAHTERA DAN TANTANGAN ISLAMISME

Muhammad Wildan

Sebagai sebuah partai bercorak Islamis yang relatif baru muncul di era reformasi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menarik untuk dikaji. Partai ini muncul pada momentum yang tepat. Pertama, partai ini muncul di tengah gelombang revivalisme Islam di dunia dan juga maraknya (re)-Islamisasi di Indonesia. Kedua, partai ini muncul di saat pergantian politik Orde Baru ke Era Reformasi. Keinginan dan kerinduan akan Islam di pentas politik sebagai efek dari kebangkitan Islam dijawab terjawab dengan munculnya partai yang merupakan manifestasi dari pengaruh gerakan Ikhwanul Muslimin di Mesir. Di Indonesia, partai ini juga dikenal sebagai gerakan Tarbiyah. Bagaimana sejarah, perkembangan, dan dinamika internalnya akan dibahas dalam artikel ini.

A. Pendahuluan

Berbeda dengan partai politik pada umumnya di Indonesia, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tidak sekedar partai politik, namun juga lembaga dakwah yang solid. PKS yang baru muncul di era reformasi telah memberikan ‘tontonan’ baru dalam berpolitik di Indonesia. Secara umum, suatu partai politik muncul karena mempunyai basis massa yang kuat di masyarakat. Namun PKS tumbuh dan berkembang sebagai partai politik dan sekaligus membangun basis massanya. Di satu sisi partai ini tumbuh dengan pesat di tengah maraknya gerakan Islam politik (Islamisme) di



berbagai negara Muslim sejak era 90-an. Di sisi lain partai ini juga berkembang seiring dengan maraknya nilai-nilai modernitas seperti demokrasi, pluralisme, HAM dll.

Secara umum, kemunculan dan perkembangan partai PKS di Indonesia merupakan fenomena menarik. Karena perolehannya 7 kursi di DPR di pemilu pertama pada 1999, maka partai ini sering disebut sebagai keajaiban politik (Rahmat, 2008: 1). Di satu sisi, tidak sedikit sarjana Barat yang dengan pesimis mengatakan bahwa Islam merupakan hambatan bagi demokratisasi di negara-negara Muslim. Namun keberadaan partai-partai seperti PKS di Indonesia, *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) di Turki dll. di negara-negara mayoritas Muslim telah membalikkan asumsi tersebut. Beberapa partai Islam konservatif justru menerima demokrasi dan bahkan memperjuangkan Islam secara konstitusional. Dengan jelas PKS menetapkan demokratisasi, pemberdayaan masyarakat, *good governance*, dan agenda reformasi sebagai agenda perjuangannya (Rahmat, 2008: 7).

Tulisan ini berusaha untuk menjawab beberapa pertanyaan seputar keberadaan dan perkembangan partai ini. *Pertama*, benarkan bahwa gerakan ini adalah manifestasi gerakan Ikhwanul Muslimin (IM) di Mesir? *Kedua*, bagaimana gerakan ini tumbuh dan berkembang dengan cepat baik di ranah politik maupun dakwah (sosial)? *Ketiga*, benarkah partai ini mempunyai agenda-agenda politik konservatif. *Terakhir*, sejauh mana gerakan ini menerima dan menggunakan demokrasi untuk tujuan-tujuan politiknya? Beberapa hal di atas yang akan dijawab dalam tulisan ini. Tulisan ini akan menggunakan konsep Islamisme Bassam Tibi di satu sisi dan juga konsep pos-Islamisme Asef Bayat. Terakhir, tulisan ini merupakan hasil dari riset pustaka terhadap berbagai tulisan baik buku, disertasi, laporan penelitian, maupun artikel ilmiah populer di media massa. Penulis berharap tulisan ini bisa menjawab berbagai keingintahuan para pembaca yang ingin mengetahui lebih banyak tentang partai ini.

B. Sejarah Partai Keadilan Sejahtera

Sebelum menjadi salah satu partai yang diperhitungkan dalam kancalah perpolitikan di Indonesia seperti saat ini, benih-benih



kemunculan Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang sebelumnya bernama Partai Keadilan (PK), dapat ditelusuri dari aktivisme dakwah kampus yang berkembang mulai dekade 1970-an. Grup *halaqah*, selanjutnya lebih dikenal dengan Kelompok Tarbiyah atau Jamaah Tarbiyah, merupakan cikal bakal yang melatarbelakangi berdirinya partai ini. Berbeda dari organisasi mahasiswa Islam lainnya seperti Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Persatuan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), yang lebih menekankan pada pengalaman berorganisasi dan politik, forum *halaqah* lebih menekankan pada pendalaman kajian keagamaan dan spiritualitas dalam rangka membentuk pribadi Muslim yang saleh. Dalam beberapa aspek, kemunculan Jamaah Tarbiyah dapat dibaca sebagai *counter gerakan pembaharuan Islam* pada masa itu oleh sejumlah intelektual seperti Nurcholis Madjid, Abdurrahman Wahid, Harun Nasution, Munawir Sadzali dan lainnya.

Marak dan semakin menguatnya berbagai kegiatan Tarbiyah menjadi bukti bahwa Islam ideologis masih subur di negeri ini (Rahmat, 2008: 6). Model gerakan Tarbiyah memiliki struktur yang rapi. Perekutan anggota dilakukan dengan selektif untuk mendapatkan kader-kader potensial. Selain pertemuan mingguan, gerakan Tarbiyah juga melakukan pertemuan berkala, diskusi buku, hafalan ayat, renungan malam, kewirausahaan, silaturahmi tokoh, dan lainnya. Pengorganisasian dan pembentukan gerakan Tarbiyah mengacu pada gerakan organisasi Ikhwanul Muslimin di Mesir (Qodir, 2013). Jamaah Tarbiyah mengawali gerakannya dengan melakukan serangkaian pertemuan rutin dengan memanfaatkan masjid kampus atau musala fakultas. Istilah *halaqoh* sendiri merujuk pada penyelenggaraan pertemuan rutin anggota gerakan ini yang terdiri dari *murabbi* (mentor) dan *mutarabbi* (murid) yang jumlahnya tidak lebih dari 12 orang. Di dalam forum tersebut, di samping membahas masalah-masalah keagamaan, mereka juga mendiskusikan masalah akademik. Mereka membangun kebersamaan, menjadi seperti sebuah keluarga, dalam naungan semangat keislaman di mana spiritualitas, kesalehan, ketaatan dalam beribadah, dan solidaritas menjadi ciri khas gerakan ini (Machmudi, 2006).



Berbeda dengan organisasi mahasiswa lainnya yang cenderung menghabiskan energi untuk melakukan kritik dan konfrontasi dengan pemerintah, gerakan Tarbiyah melakukan strategi menarik diri dari hiruk-pikuk kehidupan politik tersebut. Seperti yang diketahui bahwa pada dekade 1970-an sampai 1980-an pemerintah Orde Baru bersikap represif terhadap umat Islam, termasuk kepada gerakan mahasiswa. Pada tahun 1979 pemerintah Orde Baru Suharto menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus (NKK) untuk melemahkan aktivisme gerakan mahasiswa. Pada 1984 kebijakan “Asas Tunggal Pancasila” juga berdampak pada kemampuan organisasi ekstra kampus dalam membangun koneksi dengan mahasiswa (Machmudi, 2006: 116). Dalam situasi seperti itu, strategi menarik diri gerakan Tarbiyah dapat dibaca sebagai bentuk perlawanan mereka terhadap kebijakan pemerintah dengan cara membangun solidaritas internal dan penanaman ideologi Islam kepada para kader.

Beberapa sumber mengatakan bahwa gerakan Tarbiyah ini memiliki banyak kesamaan dengan sayap moderat Ikhwanul Muslimin. Pemikiran yang menjadi rujukan gerakan ini antara lain Hasan Al-Banna (1906-1949), pendiri Ikhwanul Muslimin di Mesir, termasuk Ismail Hasan Hudhaibi, dan Yusuf Qaradhawi. Setelah karya Al-Banna, buku karangan Hudhaibi *“Kami Mengajak dan Bukan Menghakimi”* dan karya Qaradhawi *“Islam Ekstrem”* menjadi rujukan utama (Qodir, 2016). Selain itu, pemikiran Sa’id Hawwa juga menempati posisi yang khusus dalam gerakan ini. Karya-karya Sa’id Hawwa seperti *Allah, Ar Rasul, Al Islam*, dan *Jundullah* diterbitkan oleh Gema Insani Press (Qodir, 2016).

Sebagai sebuah gerakan, sebagaimana dicatat Machmudi (2006), Jamaah Tarbiyah memiliki perhatian pada gagasan untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah sebagai sumber utama ajaran Islam. Namun, berbeda dengan gerakan reformasi Islam seperti Persis dan Muhammadiyah, gerakan Tarbiyah dalam mewujudkan ideal tersebut bersifat lebih fleksibel, tidak sekéras kedua ormas tersebut dalam mempraktikkan purifikasi Islam. Gerakan ini lebih kepada mempromosikan gaya hidup islami di masyarakat sekaligus memiliki



perhatian terhadap peran Islam dalam dunia politik. Oleh karena itulah gerakan ini menggunakan jargon Islam Kaffah (Rahmat, 2008: 6).

Sejumlah sarjana berpendapat bahwa perkembangan gerakan Tarbiyah tidak terlepas dari peran Dewan Dakwah Islam Indonesia (DDII). Dalam hal ini, Mohammad Natsir, tokoh partai Masyumi dan pendiri DDII, berjasa besar dalam mengirim anak-anak muda untuk belajar ke Timur Tengah di mana setelah kembali ke tanah air mereka membawa ideologi Islam untuk disuntikkan di gerakan ini (Basyir, 2014). Dengan bekerja sama dengan DDII, gerakan Tarbiyah membangun banyak lembaga, seperti lembaga pendidikan Nurul Fikri, lembaga dakwah Khoiru Ummah, kelompok kesenian nasyid, dan majalah *Sabili* dan *Ummi*. Zuly Qodir (2013) mencatat bahwa majalah *Sabili*, sebagai salah satu media penyebaran ideologi gerakan Tarbiyah, dijual dengan harga murah sehingga bisa menjangkau masyarakat luas. Harga satuan majalah ini pada dekade awal 1990an berkisar di harga Rp 600,- rupiah dengan kertas yang bagus dan nyaris tidak menggunakan iklan.

Selain itu, gerakan Tarbiyah juga menyebarkan berbagai gagasan dan pemikiran mereka melalui buku-buku dan karya terjemahan utamanya dari para pemikir Ikhwanul Muslimin. Beberapa penerbit tersebut antara lain Gema Insani Press (GIP), Rabbani Press, Pustaka Al-Kautsar, Era Intermedia, dan Asy-Syamiil (Basyir, 2014: 244). Buku-buku terbitan GIP pada masa itu dijual dengan harga 600-5500 (katalog 1991) sehingga terjangkau oleh kantong para pelajar dan mahasiswa (Qodir, 2013: 132).

C. Dari Gerakan Dakwah ke Partai Politik

Pada perkembangan berikutnya, tepatnya pada tahun 1986, berbagai LDK di berbagai universitas di Indonesia sepakat mendukung berdirinya Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus (FSLDK). Adapun tujuan dari forum ini adalah sebagai wadah koordinasi para aktivis dakwah di berbagai kampus di seluruh Indonesia yang bertujuan untuk membangun jejaring dakwah yang lebih luas dan terorganisir (Muhtadi: 2012, 43). Dengan memanfaatkan pertemuan tahunan ke-10 di Malang pada 1998, yang dihadiri ratusan mahasiswa



dari seluruh penjuru Indonesia, beberapa aktivis mahasiswa LDK mengumumkan berdirinya Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI).

Pada penghujung akhir pemerintahan Orde Baru Suharto, KAMMI tampil sebagai salah satu organisasi mahasiswa yang vokal dalam menyuarakan ketidakpuasan publik melalui sejumlah demonstrasi di berbagai pelosok negeri. Sebagaimana digambarkan oleh Richard G. Kraince (2000), aksi demonstrasi KAMMI dicirikan dengan menggunakan atribut keislaman yang kuat, seperti mengenakan jilbab bagi peserta perempuan. Dengan kelihian organisasi mahasiswa ini dalam menarik perhatian media, KAMMI tampil sebagai salah satu organisasi mahasiswa terdepan yang mendesak terjadinya perubahan dalam pemerintahan Indonesia. Sebagai organisasi mahasiswa yang relatif baru, lanjut Kraince (2000), KAMMI segera mendefinisikan tanggung jawab dan peran sosialnya meliputi tiga entitas sosial; bangsa Indonesia, umat Islam, dan gerakan mahasiswa secara umum.

Kemunculan KAMMI dalam lanskap kehidupan sosial-politik di Indonesia ditanggapi oleh Kuntowijoyo dengan esainya yang terkenal “Muslim tanpa Masjid” (2001). Kuntowijoyo menyebutkan bahwa mereka adalah representasi dari generasi Muslim baru yang tidak menginduk pada ormas Islam *mainstream* seperti NU dan Muhammadiyah. Budayawan dari UGM itu menarasikannya dengan istilah ‘lahir dari rahim sejarah tanpa kehadiran sang ayah dan tidak ditunggui saudara-saudaranya’. Artinya, sebagai kelompok sosial baru, mereka menyuarakan aspirasi umat Islam meskipun tidak menjadi bagian dari organisasi-organisasi keagamaan Islam tersebut. Mereka adalah generasi baru yang bermekaran dan ada di mana-mana. Pengetahuan keagamaan mereka bukan dari lembaga konvensional, seperti masjid, pesantren, atau madrasah, melainkan dari sumber anonim, seperti kursus, seminar, buku, majalah, kaset, CD, VCD, internet, radio, dan televisi.

Burhanuddin Muhtadi (2012) mencatat bahwa kehadiran KAMMI di pentas gerakan mahasiswa dan sosial-politik di Indonesia menunjukkan kepada kita telah terjadinya evolusi gerakan dakwah



kampus dari “gerakan apolitis” menuju “gerakan sosial-politik”. Di dalamnya telah terjadi transformasi gerakan dakwah dari yang bersifat personal dan pasif menuju gerakan dakwah kritis terhadap negara. Segera setelah pengunduran Suharto pada 21 Mei 1998, tokoh-tokoh KAMMI mulai mempertimbangkan untuk mendirikan partai politik Islam sebagaimana yang akan kita diskusikan pada sub bahasan berikutnya.

Sebagai partai politik baru yang terlahir dari rahim gerakan dakwah, hal utama yang dilakukan oleh petinggi Partai Keadilan (PK) adalah memastikan proses transfer loyalitas ideologis gerakan dakwah kampus ke dalam partai berlangsung secara baik. Sebab, hal ini akan berpengaruh terhadap kesuksesan partai dalam jangka panjang (Muhtadi, 2012: 45). sebagaimana gerakan dakwah, secara ideologis PK menjadikan Islam sebagai ideologi politiknya. Islam, dalam hal ini, sebagaimana dicatat Noorhaidi Hasan (2012) didefinisikan oleh PK sebagai sistem yang lengkap dan universal yang mengatur semua aspek kehidupan mulai dari sosial, politik, ekonomi, dan budaya.

Meskipun pada awalnya diwarnai pro-kontra terhadap pendirian partai politik di kalangan gerakan Tarbiyah, pada akhirnya pasca jajak pendapat, mereka bersepakat mendirikan partai politik Islam ini. Jajak pendapat tersebut dilakukan dalam bentuk *polling* (jajak pendapat) dengan metode survei yang melibatkan 6.000 responden yang seluruhnya adalah mahasiswa yang pernah aktif di gerakan dakwah kampus dan juga alumni. Inti dari pertanyaan *polling* (jajak pendapat) tersebut adalah bentuk apa yang ditampilkan untuk muncul ke tengah-tengah publik pada era reformasi ini? Apakah bentuk organisasi massa (ormas), organisasi politik, atau tetap mempertahankan bentuk penampilan yang selama ini digunakan yaitu dalam berbagai bentuk lembaga dan yayasan. Hasilnya, sebanyak 68% responden menginginkan berdirinya partai politik, dan hanya 27% saja yang menginginkan berdirinya organisasi massa saja. Akhirnya, pada 9 Agustus 1998, pembentukan PK dideklarasikan di lapangan Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta dan dihadiri oleh sekitar 50.000 massa (Nurhasim: 2016).



Mereka berkeyakinan bahwa syariat Islam merupakan alternatif atau solusi untuk memimpin umat. Dengan menerapkan syariat Islam, umat Islam akan mampu melawan dominasi kekuatan Barat yang telah berkolaborasi dengan Zionis dalam melemahkan umat Islam. Dalam retorika ini, tampak bahwa PK menolak eksistensi sistem negara-bangsa, yang dituduh menjadi alat imperialis Barat untuk memecah belah bangsa Muslim dan meruntuhkan khilafah Islam. Tidak mengherankan jika kemudian PK memiliki perhatian yang tinggi terhadap isu solidaritas umat Islam dan pembentukan kembali sistem khilafah (Hasan, 2012). Namun, pandangan islamis dan eksklusif seperti ini di ranah realitas politik Indonesia ternyata tidak mampu menarik banyak kalangan untuk memilih PK sebagai penyalur aspirasi rakyat. Hal ini dibuktikan dengan perolehan suara PK yang hanya mendapatkan 1,4% dari total suara pemilih pada Pemilu 1999 dan gagal mencapai 2% *electoral threshold*, yakni ambang batas perolehan suara minimal partai politik dalam Pemilu untuk mendapatkan kursi di parlemen.

Secara rinci, pada Pemilu 1999 tersebut PK memperoleh suara sebanyak 1.436.565 suara atau 1,36% dari jumlah total suara. Pada saat itu, PK belum melebarkan sayap basis massanya di luar kader gerakan Tarbiyah. Terkait jumlah kader Tarbiyah, beberapa sumber menyatakan bahwa pada masa itu kader Tarbiyah mencapai 42.202 orang. Jumlah ini terdiri dari kader inti sebanyak 2.371 orang, dan kader pendukung sebanyak 39.831 orang. Kader ini terdiri dari 120 Anggota Ahli dan 2.251 Anggota Dewasa, dengan komposisi 2.049 laki-laki dan 322 perempuan. Di samping itu, sebagian sumber lain menyebutkan bahwa tidak semua kader Tarbiyah memberikan suaranya untuk PK dalam Pemilu tersebut (Darmawan, 2016).

Gagal mencapai ambang batas *elektoral*, maka para elite PK menyiasatinya dengan cara mengganti nama dan lambang partai. Pada 20 April 2003 mereka mendeklarasikan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di lapangan Monas Jakarta sekaligus menandai peleburan PK ke dalam PKS.



D. PKS: Partai dan Gerakan Dakwah

PKS dilahirkan dari gerakan dakwah Tarbiyah. Partisipasi PKS dalam gelanggang politik nasional; sebagai peserta dalam Pemilu, mendeklasikan wakil-wakilnya dalam DPR dan MPR, termasuk menjadi pemimpin daerah menjadi bagian dari strategi dakwah PKS di level negara. Berbeda dengan Hizbut Tahrir dan kelompok Islam lainnya yang menggunakan pendekatan *top-down* dalam penegakan syariah Islam (termasuk mendirikan khilafah), PKS lebih mengedepankan pendekatan *bottom-up* atau gradual di mana dakwah dimulai dari level individu (*islah al-fard*), keluarga dan masyarakat (*islah al-usrah wa al-mujtama*), dan kemudian negara/pemerintah (*islah al-hukumah*).

Pemilu 1999 memberikan pelajaran berharga bagi PKS di mana dengan hanya mengandalkan suara dari jaringan gerakan Tarbiyah belum cukup untuk bisa eksis dalam dinamika kehidupan politik di Indonesia. Dalam hal ini, doktrin utama yang digaungkan PK yaitu “*al-jama‘ah hiya al-hizb wa al-hizb huwa al-jama‘ah*” (jamaah adalah partai dan partai adalah jamaah). Setelah bertransformasi menjadi PKS, partai ini berusaha untuk mendapatkan simpatisan publik dengan membranding sebagai partai yang mengusung reformasi moral dengan slogannya yang terkenal ‘bersih dan peduli’.

Menjelang Pemilu 2004, PKS meluncurkan kampanye populer dengan membawa isu masalah lemahnya ekonomi negara dan korupsi yang menggurita. Pada saat yang sama, PKS menerjunkan kader-kadernya menjadi sukarelawan pada sejumlah bencana alam di berbagai wilayah di Indonesia seperti peristiwa Tsunami di Aceh 2004. Selain itu, PKS juga dikenal vokal dalam menyuarakan peringatan terhadap bahaya kebijakan luar negeri Amerika Serikat bagi dunia Islam. Partai ini menerjunkan kader-kader dan simpatisannya untuk menggelar sejumlah aksi demonstrasi damai melawan invasi Amerika ke Afghanistan dan Irak serta konflik Israel-Palestina (Hasan, 2013).

Pada Pemilu 2004, suara yang diperoleh PKS mengalami kenaikan yang signifikan. Partai ini memperoleh suara sebanyak 7,34% (8.325.020) dan mendapatkan 45 kursi di DPR dari total 550 kursi. Perolehan ini merupakan angka yang fantastis mengingat PKS



merupakan partai baru yang tidak memiliki hubungan genealogis dengan partai-partai Islam sebelumnya maupun dengan ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah. Menurut Liddle, sebagaimana dikutip Darmawan (2016), bahwa PK mewakili kelompok Islam baru yang tidak berakar pada kekuatan organisasi modernis yang pernah ada di Indonesia. Kantung utama pemilih partai ini terutama berasal dari kalangan masyarakat urban dan terkonsentrasi di sejumlah universitas terkemuka.

Salah satu yang menarik pada periode ini adalah kemenangan PKS di DKI Jakarta (24%) yang sebelumnya merupakan basis PDI-P dan Golkar. Pada saat itu simbolisasi sebagai partai bersih dan dapat dipercaya menjadi harapan baru bagi masyarakat terhadap masa depan politik Indonesia. Selain itu, hal ini juga menunjukkan kemampuan PKS dalam merangkul segenap kekuatan politik Islam, baik yang ada dalam ormas-ormas Islam maupun generasi Islam baru (Darmawan, 2016).

E. Ideologi PKS

1. Pengaruh Ikhwanul Muslimin (IM)

Ibnu Burdah (2017) menyatakan bahwa secara formal-struktural tidak ada hubungan antara PKS dan IM di Mesir. Hal ini berbeda dengan hubungan antara Ikhwan Mesir dengan Partai Keadilan dan Pembangunan Maroko, Partai AKP Turki, serta Hamas yang mudah untuk ditelusuri. Hubungan tersebut dapat diketahui dengan respons sejumlah partai tersebut terhadap sejumlah peristiwa penting terkait dengan IM seperti naiknya Mursi jadi presiden, penjatuhan oleh militer dan demonstrasi terorganisasi, pengadilan sang Mursyid 'Amm, dan lainnya. Adapun respons PKS tidak terlihat seperti itu terhadap peristiwa penting terkait IM di Mesir.⁷³ Selain itu, jika PKS merupakan kepanjangan tangan dari IM di Mesir, tentu akan menjadi masalah serius baik bagi partai ini maupun ketika berhadapan dengan negara.

Namun demikian, bukan berarti bahwa tidak ada hubungan sama sekali antara IM dan PKS. Sebaliknya, hampir dalam seluruh

⁷³ Ibnu Burdah, "Adakah Hubungan PKS dengan Ikhwanul Muslimin" Jawa Pos, 1 Mei 2017.



sistem partai ini mendapatkan pengaruh yang kentara dari IM dari sisi proses kelahiran, istilah yang digunakan (seperti *tarbiyyah*, *liqo'*, *usrah*, *harakah*, dan *siyasah*), kaderisasi, dan cita-cita politik. Rumusan Partai Hizbul Hurriyah wal Adalah, yaitu partai bentukan IM, hampir sama dengan rumusan PKS (Burdah, 2017). Kemiripan juga dapat dilihat pada ideologi Islam keduanya.

Pengaruh IM terhadap ideologi Islam PKS tampak dari tahap-tahap agenda Islamisasi yang dimiliki partai ini. Tifatul Sembiring, sebagaimana dikutip Ahmad-Norma Permata (2010), menyatakan bahwa tahapan Islamisasi itu meliputi fase sebagai berikut: pertama, *Ta'sisi* yang merujuk kepada proses awal terbentuknya gerakan dakwah. Kedua, *Tandzimi* yaitu tahap pembentukan yang merujuk kepada pembentukan organisasi, termasuk rekrutmen kader dan pengembangan jaringan (*network*) organisasi. Ketiga, *Sya'bi* yaitu tahap sosialisasi di mana gerakan dakwah mulai memperkenalkan aktivitasnya di publik yang lebih luas, dan merekrut anggota secara terbuka. Keempat, *Muasasi* yaitu tahap penetrasi, yang ditunjukkan dengan partisipasi gerakan dakwah di dalam proses politik institusional, seperti ikut dalam pemilu. Terakhir, yaitu *Dauliy* atau tahap pemerintahan, di mana aktor-aktor dakwah menempati posisi di pemerintahan.

Menurut Hilmi Aminuddin, ketua Majelis Syuro PKS (2004-2009), adopsi model dengan mengacu pada Ikhwanul Muslimin adalah upaya untuk melembagakan kesatuan iman (akidah) dan pemikiran (fikrah); dalam hal ini, nama gerakan itu tidak menjadi hal yang penting. Beberapa gerakan yang terkait dengan Ikhwanul Muslimin mengambil bentuk partai politik, seperti di Yordania, Yaman dan Indonesia, sementara banyak lainnya mengadopsinya dalam bentuk organisasi sosial. Dalam kasus Indonesia, seorang tokoh IM yang berbasis di Qatar, Yusuf Qardawi telah menyatakan dalam salah satu bukunya bahwa partai yang didukung Jemaah Tarbiyah adalah bagian dari misi IM di Mesir. Namun, komunitas Jemaah Tarbiyah sendiri tidak pernah mengklaim hubungan organisasi dengan para IM. Hidayat Nur wahid, mantan presiden PKS mengatakan, "kami tidak ingin mengaku identik dengan IM karena gerakan ini sangat besar.



Kami takut mengklaimnya karena dapat merusak citra IM. Kami hanya bekerja untuk dakwah Islam. “

2. PKS sebagai bentuk *Al-Salaf Al-Salih*

Sebagai partai politik dan gerakan dakwah, kader PKS terdiri dari beragam latar belakang ormas keagamaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa kader PKS tidak homogen. Bagi kader yang berlatar belakang NU, misalnya, mereka tetap melestarikan sisi tradisionalitas NU seperti *tahlilan* dan ziarah kubur. Begitu juga dengan kader lainnya yang berasal atau berafiliasi dengan ormas tertentu seperti Muhammadiyah atau Persis. Hilmi Aminudin, misalnya, tokoh pendiri jamaah Tarbiyah dan pernah menjabat sebagai ketua majelis Syuro PKS ini berasal dari NU dan pernah belajar secara intensif di pesantren Tebuireng Jombang sebelum melanjutkan studi ke Saudi Arabia.

Pandangan terhadap PKS sebagai bentuk *As-Salaf As-Salih* sebenarnya bisa ditelusuri dari sejarah perjalanan gerakan ini. Dalam konteks global, gerakan IM di Timur Tengah, sebagaimana dicatat Burdah, cenderung bermusuhan dengan Salafi-Wahhabi dan Arab Saudi. Namun, dalam konteks Indonesia, Salafi-Wahhabi justru memiliki pengaruh yang signifikan dalam mewarnai gerakan Tarbiyah, sebelum menjadi PKS. Machmudi mencatat bahwa sepanjang dekade 1980-an banyak alumni Timur Tengah yang menjadi figur penting di gerakan ini, termasuk alumni dari LIPIA Jakarta. Mereka berperan penting dalam menanamkan gagasan purifikasi Islam di dalam kader gerakan Tarbiyah.

Sejarah mencatat bahwa hubungan antara Salafi-Wahhabi dengan Tarbiyah memburuk pasca gerakan Tarbiyah ikut mendukung Irak dalam Perang Dingin pada tahun 1990. Seperti yang diketahui bahwa kelompok Salafi dikenal sebagai gerakan keagamaan non-politis dan memberikan dukungan terhadap kebijakan Saudi Arabia. Hal ini kemudian berakibat berhentinya bantuan dana dari Arab Saudi ke gerakan Tarbiyah di Jakarta. Terjadi friksi antara Salafi, yang non-politis dan mendukung Saudi Arabia dengan IM yang terjun di dunia politik.



Bagi kalangan Salafi, PKS dianggap keluar dari manhaj *As-Salaf As-Salihi* dan dituduh penuh dengan bid'ah. Tuduhan ini, salah satunya, dikarenakan sosok Hasan Al-Banna yang dianggap sebagai figur problematik karena menggabungkan antara ajaran Salafi dan sufisme. Bagi kalangan salafi “murni”, Al-Banna dianggap tidak memiliki komitmen terhadap doktrin salafi. Gagasan-gagasan Al-Banna yang tidak dapat diterima oleh kelompok ini sebagian besar terkait dengan pengadopsiannya terhadap karya-karya ulama abad pertengahan terutama al-Ash'ari dan al-Ghazali. Sebagian besar kalangan Salafi tidak menerima pemikiran kedua tokoh ini, sedangkan Al-Banna sangat familiar dengan keduanya (Machmudi, 2006).

3. Al-Islamu Dinun wa Daulah

PKS sebagai partai politik meyakini bahwa Islam dan negara tidak dapat dipisahkan, meskipun hal tersebut tidak termaktub di dalam AD/ART partai ini. Hasan Al-Banna sebagai rujukan pemikiran PKS menggunakan dua istilah terkait hal ini yaitu *daulah Islamiyah* (negara Islam) dan *Islah al-Daulah* (memperbaiki negara). Mendirikan negara Islam berarti mengganti pemerintahan yang ada dengan mendeklarasikan sebagai negara Islam. Adapun memperbaiki negara diartikan sebagai memperbaiki negara dengan menerapkan nilai-nilai Islam (Ahmad, 2001).

Menurut Al-Banna, negara Islam adalah negara yang merdeka, tegak di atas syariat Islam, bekerja dalam rangka menerapkan sistem sosialnya, memproklamasikan prinsip-prinsipnya yang lurus, dan menyampaikan dakwah ke segenap umat manusia. Negara Islam tidak akan pernah tegak kecuali di atas fondasi dakwah, karena negara Islam adalah negara yang mempunyai keinginan kuat untuk menegakkan misi, bukan sekadar bagan struktur, bukan pula pemerintahan yang materialistik dan gersang tanpa ruh di dalamnya. Dalam konteks ini negara Islam diperlukan dalam rangka menjaga keimanan. Menurut Al-Banna selama negara Islam belum tegak, seluruh umat Islam berdosa karena pengabaian untuk mewujudkan negara Islam (Miftahuddin, 2008).

Terkait dengan wacana khilafah ini, IM dan PKS dicurigai sebagai gerakan Islam yang mencita-citakan penegakan negara Islam secara gradual. Dhume sebagaimana dikutip Rokhmad (2014)



menyatakan bahwa PKS merupakan gerakan yang secara gradual-evolusioner bertujuan menegakkan negara Islam Indonesia di mana partai politik tidak lain hanya sebagai kedok konstitusional belaka. Abu Rokhmad (2014) menyatakan bahwa cita-cita mendirikan negara Islam ini menjadi agenda tersembunyi PKS atau disebut dengan *taqiyyah* politik PKS. Walaupun kecurigaan ini cukup beralasan dan pernah diucapkan oleh beberapa aktivisnya, namun bisa dipastikan bahkan khilafah tidak menjadi agenda formal partai. Terkait dengan agenda khilafah ini, salah satu agenda PKS dalam bidang pengembangan hukum adalah penerapan Syariat Islam sebagai hukum positif (Rahmat, 2008: 55-58).

F. PKS, Demokrasi, dan Kebangsaan

Untuk memahami bagaimana sikap PKS terhadap demokrasi dan prinsip-prinsip kebangsaan, seperti Pancasila dan keragaman atau Bhinneka Tunggal Ika, kita harus memahami terlebih dahulu fondasi ideologi dan orientasi politik PKS. Menurut Firman Noor (2015) doktrin dasar PKS pada dasarnya merupakan perpaduan antara keyakinan atas Islam sebagai ajaran komprehensif (*syumuliatul Islam*) dan pendekatan gradualisme atau moderatisme. Aspek *Syumuliatul Islam* mencerminkan visi PKS untuk membangun individu, masyarakat, dan negara berdasarkan ajaran Islam sedangkan aspek gradualisme atau moderatisme terkait dengan cara-cara yang ditempuh untuk mencapai cita-cita tersebut.

Salah satu prinsip moderatisme PKS adalah pelaksanaan doktrin *tsawabit* (fundamental) dan *mutaghayyirat* (dinamis). Doktrin *tsawabit* berkaitan dengan masalah-masalah hukum yang secara jelas dinyatakan dan diatur dalam Al-Quran dan Hadis dan bersifat absolut dan abadi. Adapun *mutaghayyirat* terkait dengan berbagai persoalan yang tidak secara komprehensif dijelaskan di kedua sumber utama hukum Islam tersebut. Secara teoretis, hal ini dikenal dengan masalah *furu'* (cabang) di dalam hukum Islam (Noor, 2015).

PKS meyakini bahwa setiap individu Muslim diperbolehkan untuk mengembangkan pendekatan kontekstual dalam menjalankan keagamaannya sebagai respons terhadap masalah *mutaghayyirat*,



termasuk aktivitas politik. Atas dasar pandangan ini, mengadopsi sebuah pandangan politik diperbolehkan selama tidak bertentangan dengan fondasi ajaran Islam. Pandangan ini memberikan partai tersebut fleksibilitas dalam menerima konsep politik modern termasuk menggunakan demokrasi sebagai mekanisme untuk mencapai tujuan politik (Noor, 2015).

Berkenaan dengan keyakinan atas konsep gradualisme, PKS menelaah kesiapan masyarakat dalam menerima format dan struktur politik Islam sebagai prasyarat utama sebelum menciptakan sebuah negara Islam. Sepanjang kesiapan ini belum terlihat, seperti Indonesia saat ini, umat Islam tidak dapat memaksakan pelaksanaan syariat Islam apalagi pendirian negara Islam. Oleh karena itu, kewajiban utama saat ini adalah memastikan bahwa spirit Islam tumbuh di masyarakat dan membantu umat Islam serta seluruh umat manusia dalam memahami kelebihan dan kebaikan ajaran-ajaran Islam.

Bagi PKS, yang lebih penting saat ini adalah membangun sistem politik untuk kepentingan seluruh umat manusia. Sistem, yang terlepas dari apapun namanya, yang diisi oleh semangat menghargai keragaman, demokrasi, dan penegakan hukum, dan lebih penting lagi, memungkinkan pelaksanaan hukum Islam bagi umat Islam, di mana tauhid menjadi fondasi kehidupan mereka.

Pandangan ini memperlihatkan pendekatan adaptif. PKS juga semakin intens memberikan pengakuan atas eksistensi nasionalisme, demokrasi, dan Pancasila sebagai fondasi negara. Sikap ini telah dilembagakan dalam AD/ART dan platform partai. Walaupun demikian, hal ini tidak berarti PKS meyakini nilai-nilai ini sebagaimana dipahami kalangan nasionalis-sekuler. Sebagai sebuah partai yang meyakini pembentukan peradaban Islam, PKS melihat nilai-nilai tersebut sebagai nilai yang bersifat sementara, sebagai salah satu tahapan dalam dakwah mereka, dari keseluruhan tahap menuju islamisasi yang lebih menyeluruh (Noor, 2015).

G. Antara Islamisme dan Post-Islamisme

Untuk melihat sejauh mana aspek islamisme di tubuh gerakan PKS, kiranya penting untuk kita ketahui bagaimana identifikasi



islamisme dan perbedaannya dengan Islam dan post-Islamisme. Bassam Tibi dalam karyanya *Islam dan Islamisme* (2016) menyatakan Islamisme sebagai ideologi yang menghubungkan agama (*din*) dan negara (*daulah*) dalam tatanan politik berbasis syariat. Islamisme merupakan respons politik budaya terhadap krisis atas kegagalan pembangunan pasca-kolonial di berbagai masyarakat Islam yang berada di bawah kondisi globalisasi (Tibi, 2016: 2-3).

Dengan menggunakan pendekatan Bassam Tibi ini PKS dapat digolongkan sebagai islamis institusional, yang dibedakan dengan islamis jihadis. Kedua golongan ini memiliki tujuan yang sama untuk mendirikan negara Islam (menyatukan *din* dan *daulah*), tetapi memiliki perbedaan dalam cara yang digunakan. Kalangan jihadis cenderung menggunakan cara-cara radikal dalam mewujudkan tujuannya, termasuk digunakannya doktrin takfiri, sedangkan islamis institusional cenderung menggunakan cara-cara yang lebih moderat, atau dalam studi ini digunakan istilah gradual.

Seperti yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, penulis berpendapat bahwa PKS merupakan gerakan Islamis di Indonesia. Penerimaan terhadap demokrasi, Pancasila, dan UUD 1945 sebagai konstitusi negara bagi PKS hal tersebut bukan menjadi sesuatu yang final. Cita-cita untuk menyatukan *din* dan *daulah* akan tercapai apabila masyarakat sudah tersadarkan akan pentingnya negara Islam yang menjadi payung bagi penerapan syariah Islam. Sehingga, demokrasi dan Pancasila yang diterapkan oleh Indonesia saat ini merupakan bersifat sementara dalam rangka mencapai tujuan akhir mewujudkan negara Islam.

Di samping pengaruh kuat dari pemikiran IM, beberapa pendiri partai ini yang seperti Hilmi Amunuddin yang masih memiliki garis keturunan dari tokoh NII (Danu Muhammad) menjadi faktor penting yang membentuk aspek Islamisme di PKS. Isu yang sempat bergulir di publik tentang faksionalisasi di tubuh PKS antara faksi keadilan dan faksi kesejahteraan semakin menguatkan argumen ini. Dalam hal ini, faksi keadilan yang didominasi oleh kelompok yang mementingkan cita-cita dakwah PKS yaitu melakukan tahap-



tahap islamisasi dalam rangka menerapkan syariah Islam ketimbang kepentingan politik elektoral.

Selain beberapa hal di atas, penulis berasumsi bahwa PKS merupakan partai politik di balik digulirkannya sejumlah perda syariah di sejumlah daerah di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari penolakan PKS saat Kementerian Dalam Negeri pada tahun 2006 hendak menginventarisasi dan mengevaluasi perda syariah yang berpotensi bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika (Wahid, 2009). Meminjam istilah Abu Rokhmad (2014) cita-cita mendirikan negara Islam merupakan *hidden agenda* dari partai dakwah ini.

Hubungan PKS dengan HTI, sebagai ormas pengusung khilafah Islam, saling mendukung satu sama lain yang mengindikasikan kedekatan hubungan keduanya. Hal ini nampak terutama sebelum HTI dibubarkan oleh pemerintah.⁷⁴ Penelitian Abu Rokhmad (2014) juga memberikan petunjuk terjadinya pembelahan opini di tubuh PKS di mana sebagian kadernya menyatakan tidak membutuhkan penerapan khilafah, sementara yang lain menjadikan hal ini sebagai tujuan politik partai ini.

H. Dinamika dan Arah Gerakan PKS

Sebagai sebuah partai politik, PKS tidak luput dari intrik-intrik internal hingga konflik sebagai bagian dari dinamika partai. Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah kasus suap daging sapi impor dan pemecatan beberapa tokohnya. Walaupun hampir setiap partai besar pernah terlibat korupsi, kasus penyalahgunaan wewenang ini cukup heboh pada tahun 2013 karena melibatkan Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaq, LHI (2010-2015) yang sekaligus menjabat sebagai anggota DPR RI (2009-2014). Kasus korupsi ini merebak berbarengan dengan isu LHI menikahi dengan wanita yang masih sekolah SMA. Karena kasus ini LHI akhirnya dihukum dan akhirnya dia mengundurkan diri dari PKS. Kasus korupsi lain juga disinyalir pernah terjadi pada salah satu pendiri PKS yaitu Nur Mahmudi Ismail ketika menjabat sebagai

⁷⁴ Lihat misalnya <https://www.hidayatullah.com/berita/nasional/read/2004/05/31/1125/ormas-islam-gembira-pks-hti-bersatu.html>



Walikota Depok. Walaupun kasus kedua ini tidak seheboh kasus yang pertama, tapi hal ini cukup mengguncang PKS karena Nur Mahmudi adalah presiden pertama PKS.

Tidak berbeda dengan partai-partai lain, perbedaan paham hingga konflik internal juga terjadi di partai yang dikenal sebagai partai Islamis ini. Beberapa kasus yang pernah terjadi adalah pemecatan beberapa anggota elitenya. Yusuf Supendi sebagai mantan anggota Dewan Syariah Pusat, pendiri PKS, dan salah satu tokoh utama gerakan tarbiyah dipecat dari partai. Beberapa sumber menyatakan bahwa alasan utama pemecatan itu adalah sikap keras Yusuf agar PKS memecat ketua Majelis Syura Hilmi Aminuddin dan Anis Matta selaku Sekjen PKS, yang dianggap telah melakukan pelanggaran aturan main dan merugikan partai. Yusuf menuduh Hilmi melakukan pelanggaran AD/ART partai karena menerima tawaran sebagai Ketua Majelis Syura PKS selama tiga periode, yang menurut Yusuf di luar batas kepatutan. Sementara itu, Anis Matta dituduh memiliki kepentingan untuk membawa PKS ke agendanya sendiri. Alasan lain di balik pemecatan Yusuf di antaranya yaitu sikapnya yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai anggota DPR RI dari PKS untuk menyerahkan kontribusi finansial ke partai. (Noor, 2015: 260-263).

Pada 2008, PKS mengalami perbedaan pandangan terkait isu yang digulirkan oleh sejumlah tokoh penting partai dengan gagasan PKS sebagai ‘partai Islam terbuka’. gagasan ini memberikan peluang kepada non-Muslim untuk menjadi anggota partai dan bahkan menjadi pengurus partai. Gagasan ini muncul pertama kali sebagai respons terhadap perkembangan di sejumlah wilayah dengan mayoritas penduduk non-muslim, seperti di Papua. Di wilayah tersebut, kalangan non-muslim kerap mengajukan diri untuk dapat menjadi anggota PKS. Pada akhirnya, sebagai solusi, beberapa kader di DPP dan DPW berkeyakinan bahwa gagasan ini dapat dipahami dan secara prinsip tidak melanggar prinsip dakwah. Namun, bagi sebagian besar lainnya, gagasan ini masih belum dapat diterima, bahkan menimbulkan kegagaman.



Pada dekade awal keberadaan PKS, publik juga menangkap bahwa telah terjadi ‘faksionalisasi’ di tubuh PKS dengan adanya dua kelompok, yaitu faksi keadilan dan faksi kesejahteraan. Faksi pertama sebagai kelompok yang lebih idealis dengan kecenderungan puritan dalam mencapai tujuan partai, sedangkan ‘faksi kesejahteraan’ sebagai kelompok dengan kecenderungan pragmatis dengan tendensi moderasi dalam mengupayakan terwujudnya kepentingan partai.

Terakhir, beberapa tokoh penting PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Sidik menyatakan keluar dari PKS dan membentuk partai baru yakni Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Munculnya partai ini ditengarai karena keengganan PKS untuk berubah menjadi partai terbuka. Beberapa sumber menyebutkan bahwa Gelora merupakan partai terbuka di mana semua kalangan bisa menjadi anggota partai ini. Berbeda dengan PKS yang eksklusif sebagai partai Islam.

Sebelum bertransformasi menjadi partai, Gelora merupakan ormas bernama Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi) yang telah didirikan pada 2014 oleh Anis Matta dan Fahri Hamzah. Direktur Eksekutif Charta Politika Yunarto Wijaya mengatakan, pecahnya PKS secara organisasi tak terelakkan. Garbi yang telah bertransformasi menjadi Gelora akan menjadi entitas yang paling bersinggungan dengan PKS ke depannya. Apalagi, secara organisasi Anis berjasa membangun infrastruktur PKS sebelum dia didepak dari partai ini.⁷⁵

Jika melihat beberapa fakta tersebut, dinamika PKS saat ini dan ke depan tampaknya tarik-menarik antara kembali ke ideologi Islam dan berkompromi dengan kenyataan politik masih akan terus terjadi. Hadirnya Partai Gelora menunjukkan kecenderungan kader PKS untuk lebih mengutamakan kompromi politik, bersikap terbuka, mengakomodasi beragam kepentingan basis massanya dalam rangka agar diterima dan mendapatkan dukungan publik luas. Meskipun, sebagai konsekuensinya, pendekatan seperti ini cenderung akan mengaburkan sisi ideologi partai itu sendiri. Terkait kecenderungan

⁷⁵ <https://katadata.co.id/berita/2019/08/01/partai-garbi-pecahan-pks-yang-dimotori-fahri-hamzah-dan-anis-matta>



yang terakhir ini, kita juga dapat melihat fakta bahwa PKS juga menyerukan kadernya untuk setia kepada Pancasila dan NKRI.⁷⁶

I. Penutup

Partai Keadilan (Sejahtera) muncul dan tumbuh pada momentum yang tepat. Di satu sisi, gerakan ini muncul sebagai titik kulminasi revivalisme Islam di Indonesia. Gerakan tarbiyah telah menjadi fenomena menarik di Indonesia sejak akhir 1980-an, namun demokratisasi di era reformasi inilah yang memungkinkan berdirinya partai ini. Oleh karena itu, partai Islam ini menjawab kerinduan masyarakat akan Islam di pentas politik. Hal lain yang mendorong pertumbuhan PKS lebih cepat adalah pengaruh paham Islam politik dari berbagai gerakan Islam trans-nasional. Berbagai gerakan Islam trans-nasional yang mempunyai agenda (re)-Islamisasi Indonesia juga berpengaruh terhadap tumbuh-kembangnya partai ini.

Karena dianggap sebagai manifestasi dari Ikhwanul Muslimin di Mesir, banyak pihak “mencurigai” PKS mempunyai *hidden agenda*, tidak sekedar partai politik biasa. Sejumlah penelitian dan statemen aktivisnya menunjukkan bahwa partai ini merupakan partai Islamis yang mengusung agenda Islamisasi di Indonesia, termasuk sejumlah kadernya dengan jelas mendukung agenda Syariah dan Khilafah. Walaupun demikian, yang sudah jelas tampak di muka umum bahwa partai ini juga merupakan gerakan dakwah yang mengutamakan Tarbiyah sebagai bentuk kesalehan pribadi (*personal piety*). Di banyak wilayah, PKS termasuk partai yang mendukung maraknya Perda Syariah yang sebagian banyak merupakan perda yang mendukung kesalehan pribadi. Walaupun begitu, menarik juga untuk disebutkan di sini bahwa PKS merupakan salah satu partai yang mendapatkan dukungan dari penganut agama lain.

Terakhir, secara ideologis partai ini masih mengalami dinamika yang menarik dan belum selesai dengan jati dirinya. Walaupun hal sejenis juga terjadi di banyak partai politik karena adanya banyak kepentingan, partai PKS yang secara ideologis relatif lebih kuat

⁷⁶ Lihat misalnya, <http://pks.id/content/melalui-sci-pks-ajak-masyarakat-setia-pada-pancasila-dan-nkri>, diakses 12 Maret 2020.



tidak luput juga dari konflik-konflik internal. Upaya pimpinan untuk menjadi partai terbuka ternyata mendapatkan respons yang cukup signifikan. Hal ini terbukti dengan penolakan dan keluarnya beberapa tokoh dari partai dan membentuk partai politik sendiri (ada juga yang menyebutnya sebagai PKS Perjuangan). Beberapa hal tersebut menjadi pekerjaan rumah tersendiri bagi partai ini agar tetap bisa bertahan dalam konstelasi politik elektoral di Indonesia. Sebagai satu-satunya partai kader (Tarbiyah), PKS menjadi salah satu partai yang mampu mempertahankan perolehan suaranya di pemilu nasional. Sebagai partai politik yang tentu mendapat tantangan dan cobaan yang besar baik internal maupun eksternal, pimpinan partai saat ini ditantang untuk mampu mengelola manajemen konflik dengan baik dan lincah supaya bisa terus besar dan tidak kandas di tengah jalan.

Daftar Pustaka

- Basyir, Ach. "Ideologi Politik Dilematis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Antara Gerakan Tarbiyah Dan Pragmatisme" *Jurnal In Right: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol.3, No.2, Mei 2014.
- Burdah, Burdah, "Adakah Hubungan PKS dengan Ikhwanul Muslimin" *Jawa Pos*, 1 Mei 2017.
- Hasan, Noorhaidi, "Islamist Party, Electoral Politics and *Da'wah*: Mobilization Among Youth The Prosperous Justice Party (PKS) in Indonesia", *Journal of Indonesian Islam* Vol. 06, No. 01, June 2012.
- Kraince, Richard G., "The Role of Islamic Student Groups in the Reformasi Struggle: KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia)", *Studia Islamika* Vol.7, No. 1 2000.
- Machmudi, Yon. 2006 *Islamising Indonesia: The Rise of Jemaah Tarbiyah and The Prosperous Justice Party (PKS)*, Canberra: ANU E-Press, 2008
- Miftahuddin, "Pengaruh Ideologi Ikhwanul Muslimin Terhadap PKS di Indonesia" Skripsi Jurusan Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuludin dan Filsafat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008.



- Muhtadi, Burhanuddin, *Dilema PKS: Suara dan Syariah*, Jakarta: KPG, 2012.
- Noor, Firman, *Perpecahan dan Soliditas Partai Islam di Indonesia: Kasus PKB dan PKS di Dekade Awal Reformasi*. Jakarta: LIPI Press, 2015.
- Nurhasim, Moch. (ed.), *Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2016.
- Permata, Ahmad-Norma & Najib Kailani. *Islam and the 2009 Indonesian Elections, Political and Cultural Issues, The Case of the Prosperous Justice Party (PKS)*, IRASEC April 2010.
- Qodir, Zuly, *HTI dan PKS Menuai Kritik: Perilaku Gerakan Islam Politik Indonesia*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. 2013.
- Rahmat, M. Imdadun, *Ideologi Politik PKS: Dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen*. Yogyakarta: LKiS, 2008.
- Rokhmad, Abu “Dasar Negara dan Taqiyah Politik PKS”. *Jurnal Walisongo*, Vol. 22, No. 1, Mei 2014.
- Tibi, Bassam, *Islam dan Islamisme*. Bandung. Mizan. 2016.
- Wahid, Abdurrahman (ed.), *Ilusi Negara Islam: Ekspansi Gerakan Islam Trans nasional di Indonesia*, Jakarta: Wahid Institut, 2009.
- <http://pks.id/content/melalui-sci-pks-ajak-masyarakat-setia-pada-pancasila-dan-nki>, (diakses 12 Maret 2020)